

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabel, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser menyusun Laporan kinerja.

Laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2019 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2019.

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka

- panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran DAERAH Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 02).
  10. Peraturan Bupati Paser Nomor 75 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Daerah Kabupaten Paser
  11. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
  13. Peraturan Bupati Paser, Nomor 60 tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
  14. Peraturan Bupati Paser Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup No.60 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **1. Dasar Hukum dan Struktur organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu Kabupaten Paser yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Dearah Bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian:
  - Subbidang Pengadaan dan pemberhentian
  - Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Pengembangan dan Mutasi, membawahi :
  - Subbidang Pengembangan dan diklat
  - Subbidang Mutasi dan Kepangkatan.

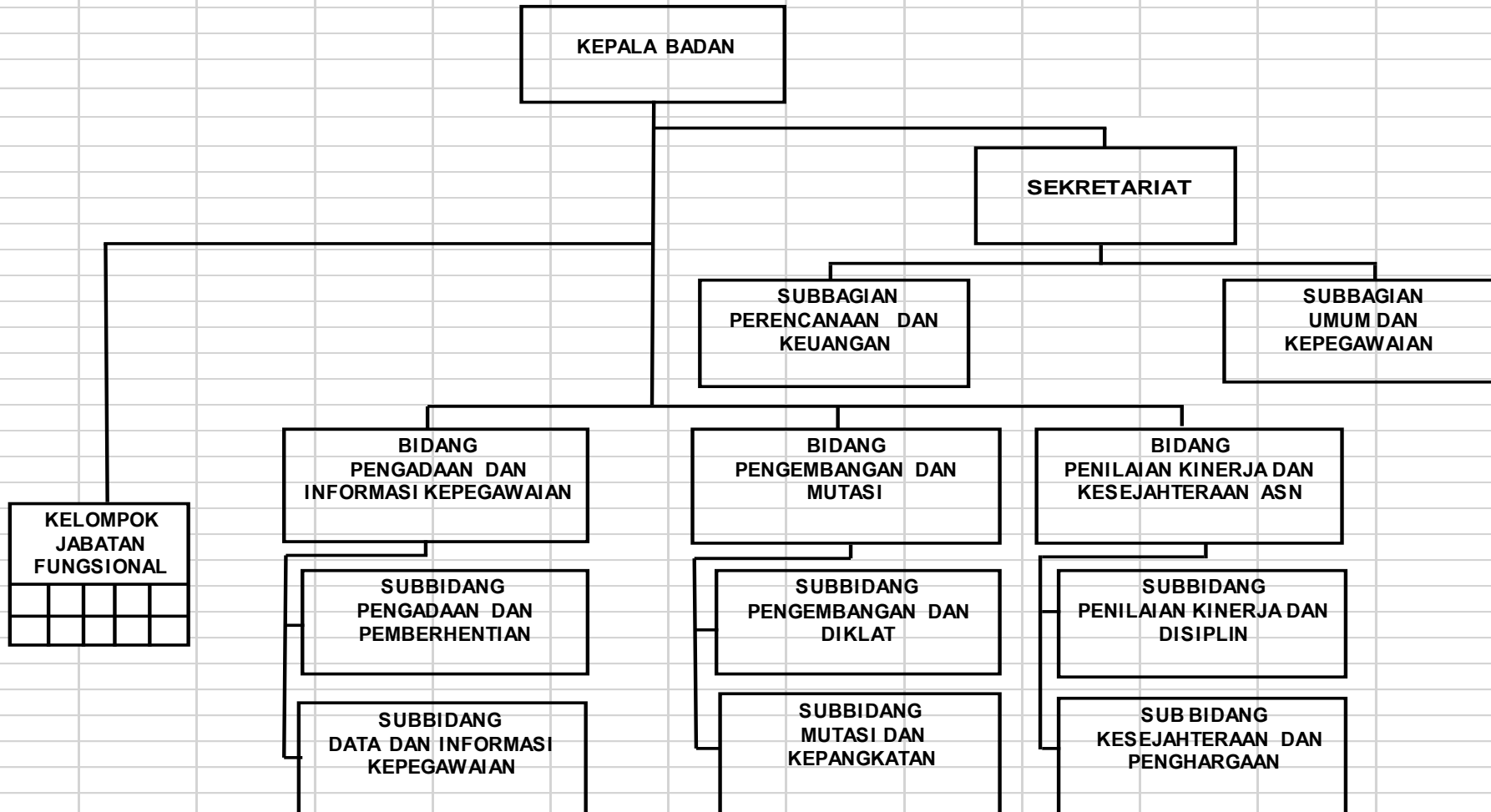
e. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN, membawahkan:

- Subbidang Penilaian Kinerja dan disiplin
- Subbidang kesejahteraan dan Penghargaan.

f. Jabatan Fungsional

Gambar 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN PASER**



## 2. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelaksanaan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Penetapan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan BKPP;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **1. Visi dan Misi BKPP Kabupaten Paser**

Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam menentukan kebijaksanaan dibidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.



Sehubungan dengan itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser, maka visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah :

**“ Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional dan Berdaya Saing”**

Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

- (1) Sumber Daya Aparatur** adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal non material/non financial yang bertugas memberikan pelayanan.
- (2) Profesional** adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja, menekuni dan menguasai bidang tugas masing-masing serta memegang teguh akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Berdaya Saing** adalah kemampuan aparatur dalam menghasilkan produk berupa jasa atau pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan, dan dalam saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- (3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Deskripsi mengenai ke empat misi diatas sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian

Semangat untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian didasarkan pada semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan pengembangan sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis pada prinsip-prinsip pelayanan prima sebagai upaya memenuhi tuntutan kualitas pelayanan. Dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan kepegawaian tersebut, maka dipandang perlu menerapkan suatu sistem pelayanan yang cepat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam sebuah organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi sangat tergantung pada tinggi atau rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas pelayanan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas pelayanan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengembangan karier serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah.

(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

Reformasi kepegawaian pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur serta sikap dan perilaku pegawai guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga tercipta sistem kepegawaian yang sehat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang ada di daerah khususnya dalam penataan dan pembinaan sumber daya aparatur sehingga sosok aparatur yang profesional dan akuntabel dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dapat terwujud. Adanya rumusan kebijakan tentang pembinaan PNS dan peraturan perundang-undangan kepegawaian diharapkan dapat mewujudkan standar pembinaan yang sama bagi seluruh PNS.

Terkait dengan penataan sumber daya aparatur, tugas lainnya yang harus dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah memfasilitasi kebutuhan sumber daya aparatur daerah yang berbasis pada kebutuhan riil instansi.

(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Pada umumnya setiap produk kepegawaian yang dihasilkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak terlepas dari keakuratan data

dan informasi kepegawaian. Pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sistem informasi kepegawaian sebagai wujud dari upaya untuk merevitalisasi seluruh sumber daya dalam sistem informasi manajemen kepegawaian agar mampu mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.

## **2. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut :

(1) Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Akurat.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian. Serta layanan Informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini

(2) Terwujudnya Sumber Daya Aparatur perangkat Daerah Kabupaten Paser yang berkompeten dan berkinerja tinggi.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur daerah. Peningkatan ini dapat tercapai melalui upaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

## **3. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

Sasaran strategis yang dirumuskan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.**

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator kinerja utama yakni :

- a. Indikator Kepuasan Masyarakat ( IKM ). Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan BKPP Kabupaten Paser apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. melalui sasaran strategis ini, Badan kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Paser mengharapkan agar seluruh pegawai baik PNS maupun PTT yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan pelayanan kepegawaian sesuai dengan harapan PNS atau instansi yang dilayani.

**2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Sasaran strategis ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat memaksimalkan kinerja tata kelola administrasi kepegawaian guna mendukung lancarnya Pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kabupaten Paser. Indikator pada sasaran ini adalah persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara

**3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.**

Dalam sasaran strategis ini juga ditetapkan ada 2 indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan yaitu ;

- Persentase Record Data Pegawai yang di update.

- Persentase Tata Naskah Pegawai yang dikelola sesuai NIP.

Indikator utama ini ditetapkan untuk mengetahui seberapa banyak tata naskah PNS yang telah tersedia, dikelola dan up to date. Melalui sasaran strategis ini diharapkan agar data dan informasi kepegawaian dikelola berbasis teknologi dan informasi ( IT ) serta akurasi database dan tata naskah dapat terwujud.

#### **4. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi ASN**

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yaitu :

- Persentase Pengadaan Pegawai pada perangkat daerah sesuai formasi.
- Persentase Penetapan pejabat structural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
- Persentase Pejabat structural yang telah mengikuti assessment test

Melalui sasaran strategis ini Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengharapkan agar PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan memiliki daya saing.

#### **4. Strategi Dan Kebijakan**

Melalui sasaran strategis yang telah di jelaskan di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengharapkan agar data dan informasi kepegawaian dikelola berbasis teknologi informasi serta akurasi database dan tatanaskah PNS dapat terwujud.

Gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Terwujudnya tata kelola Administrasi Kepegawaian yang cepat dan akurat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Menyusun standar pelayanan kepegawaian	Menerapkan standar pelayanan kepegawaian, SOP dan SIPD Pelaksanaan standar pelayanan kepegawaian Melakukan Pelayanan yang Cepat dan Akurat
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan kepegawaian Sesuai Kebutuhan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepegawaian
2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Terwujudnya tata kelola Administrasi Kepegawaian yang cepat dan akurat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis IT	mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian agar menghasilkan database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini
					Pengelolaan tata naskah dan dokumentasi data kepegawaian berbasis IT
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang berkompeten dan berkinerja tinggi	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur	Pengembangan PNS berbasis kompetensi
4	Penataan Sumber Daya Aparatur Daerah Sesuai Kebutuhan			Formasi dan rekrutmen sesuai kebutuhan	Perencanaan kepegawaian berdasarkan kebutuhan riil
			Pengisian, mutasi dan promosi jabatan sesuai dengan standar kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan instansi	Pelaksanaan pengisian, mutasi, dan promosi jabatan sesuai dengan standar kompetensi, latar belakang pendidikan dan kebutuhan instansi	

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan visi dan misi BKPP Kabupaten Paser yang telah dipertegas dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser telah menetapkan kinerja/ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

Adapun Rencana Kerja Tahunan BKPP Kabupaten Paser untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas baik maka jumlah target indikator:
  - Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu sebanyak 130 SK
  - Jumlah aplikasi kenaikan gaji berkala yang dikembangkan sebanyak 1 aplikasi
  - Jumlah kartu tanda pengenal PNS di lingkungan pemerintah kabupaten paser yang terbit sebanyak 800 kartu
  - Jumlah kartu identitas kepegawaian (Taspen, karpeg, karis, karsu, KPE, dan konversi NIP) yang terbit sebanyak 42 kartu
  - jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 166 orang;
  - Jumlah penerbitan SK kenaikan pangkat PNS yang tepat waktu sebanyak 1000 orang;
  - Jumlah penerbitan SK Jabatan fungsional yang tepat waktu sebanyak 150 orang



- Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang tersedia sebanyak 2 dokumen
  - Jumlah Dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia sebanyak 1 dokumen
  - Data Kepegawaian yang di rekonsiliasi terselesaikan menyeluruh hingga 100%
  - Jumlah data fisik dan naskah PNS yang dikelola sebanyak 870 tata naskah
  - Jumlah Pejabat yang menyampaikan data dan informasi tentang harta kekayaan sebanyak 231 dokumen
  -
- b. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang baik tercantum dalam perjanjian kinerja. Yakni :
- Jumlah dokumen data statistik sectoral SKPD yang tersusun sebanyak 10 dokumen
  - Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia sebanyak 10 kali
  - Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPP yang terbayarkan selama 12 bulan
  - Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan sebanyak 2 unit
  - Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan selama 12 bulan
  - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 12 bulan
  - Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan

- Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang tersedia selama 12 bulan
  - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan
  - Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia selama 12 bulan
  - Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan
  - Jumlah arsip skpd yang tersusun selama 12 bulan
  - Jumlah meubeler yang tersedia sebanyak 10 unit
  - Terpeliharanya Gedung kantor selama 12 bulan
  - Terpeliharanya mobil jabatan sebanyak 1 unit
  - Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional sebanyak 1 unit
  - Terpeliharanya perlengkapan Gedung kantor selama 12 bulan
  - Terpeliharanya peralatan Gedung kantor selama 12 bulan
  - Terkelolanya assessment center BKPP selama 12 bulan
- c. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan ASN yang berkualitas dan kompeten dengan mentargetkan :
- Jumlah aparatur yang mengikuti diklat prajabatan sebanyak 166 orang
  - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM II, III,IV sebanyak 70 orang
  - Jumlah aparatur daerah yang mengikuti teknis tugas dan fungsi sebanyak 45 orang
  - Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 150 orang
  - Jumlah SKP yang terkumpul dan dievaluasi sebanyak 4831 PNS

- PNS yang memperoleh penghargaan berupa SLKS sebanyak 500 orang
- Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan yang ditargetkan sebanyak 12 kasus
- Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi persyaratan sebanyak 120 orang
- Jumlah aparatur yang mengikuti sumpah janji PNS sebanyak 150 orang
- Jumlah dokumen laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin ASN sebanyak 4831 dokumen
- Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan sebanyak 500 orang
- Jumlah PNS tugas belajar sesuai kebutuhan sebanyak 14 orang
- Jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai kebutuhan sebanyak 6 kali
- Jumlah jabatan yang dilelang sebanyak 4 jabatan
- Jumlah PNS yang mengikuti Assessment yakni 20 orang
- Jumlah pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural sebanyak 11 kali pelantikan
- Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPP Paser, BKD provinsi dan BKN sebanyak 35 SK

pada akhir periode tahun 2019. Rencana Kerja tersebut diperkuat dengan Perjanjian Kinerja Kepala BKPP Kabupaten Paser dengan Bupati Paser.

## C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja sebagai berikut

**Tabel. 2**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KAB. PASER**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
			jumlah	kuantitas	
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara	A	Grade	
		Indikator Keegiatannya adalah :			
		Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu	130	SK	266.024.000
		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1	apl	58.132.400
		Jumlah SK Peninjauan/SK Perbaikan	12	org	62.600.000
		Jumlah kartu tanda pengenal PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser yang terbit	800	kartu	38.362.500
		Jumlah kartu identitas kepegawaian (Taspen, Karpeg, Karis, Karsu, KPE dan Konversi NIP) yang terbit	42	kartu	88.015.000
		Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	166	cpns	196.350.000
		Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu (orang)	1000	org	389.676.000
		Jumlah Penerbitan SK Jabatan Fungsional yang tepat waktu	150	org	186.650.000

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Record data Pegawai yang diupdate	100	%		
		Persentase tata naskah pegawai yang dikelola sesuai NIP	100	%		
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung:</i>				
		Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang tersedia	2	dokumen		153.675.000
		Jumlah Dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia	1	dokumen		56.900.000
		Data Kepegawaian yang di rekonsiliasi	100	%		10.855.000
		Jumlah data fisik dan naskah PNS yang dikelola	850	tata naskah		21.880.400
		Jumlah Pejabat yang menyampaikan data dan informasi tentang harta kekayaan	231	dokumen		91.560.000
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Persentase Sarana dan Prasarana yan terpelihara	100	%		
		<i>Indikator Kegiatan Pendukung :</i>				
		Jumlah Dokumen Data Statistik Sektorl SKPD yang tersusun	10	dokumen		15.263.800
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	10	kali		500.000
		Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKD terbayarkan	12	bulan		53.270.000
		Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	12	bulan		4.000.000
		Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan	108	OB		110.100.000
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	bulan		50.000.000
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12	bulan		17.210.000
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang tersedia	12	bulan		14.000.000
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	19	unit		226.008.000
		Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	12	bulan		4.104.000
		jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	350	kotak		7.000.000
		Jumlah penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan		215.230.000
		Jumlah Arsip SKPD yang tersusun	12	bulan		120.938.000
		Jumlah Meubelair yang diadakan	10	unit		49.200.000
		gedung kantor yang terpelihara	12	bulan		9.780.000
		Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan	1	unit		12.000.000
		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	1	unit		10.000.000
		Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12	bulan		14.300.000

		Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	12	bulan	17.600.000
		Jumlah Assessment Center yang dikelola	12	bulan	250.450.000
		Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD yang tersusun	10	dokumen	37.650.000
		Evaluasi Renja yang tersusun	4	triwulan	4.950.000
		Jumlah Dokumen LKjIP yang tersusun	10	dokumen	3.150.000
4	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Pengadaan Pegawai pada Perangkat Daerah sesuai formasi	100	%	
		Persentase Penetapan Pejabat structural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	100	%	
		Persentase pejabat structural yang telah mengikuti assessment test	100	%	
		<i>Indikator Kegiatan Pendukung:</i>			
		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM II,III,IV	70	org	3.834.141.800
		Jumlah Aparatur Daerah yang mengikuti teknis tugas dan fungsi	45	org	1.124.975.000
		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan	166	org	3.600.387.000
		Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan (orang)	150	org	121.870.000
		PNS yang memperoleh penghargaan berupa SLKS	500	org	132.200.000
		Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan	12	dokumen	158.194.000
		Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi persyaratan	120	org	67.825.000
		Jumlah SKP yang terkumpul dan dievaluasi	4831	org	131.179.600
		Jumlah aparatur yang mengikuti sumpah janji PNS	150	pns	121.315.000
		Jumlah dokumen laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin ASN	4831	dokumen	57.519.600
		Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan	500	org	299.703.400
		Jumlah PNS Tugas Belajar sesuai kebutuhan (orang)	14	org	784.234.600
		Jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai kebutuhan	6	kali	417.650.000
		Jumlah Jabatan yang dilelang	4	jabatan	848.435.000
		Jumlah PNS yang mengikuti Assessment	20	org	492.770.200
		Jumlah Pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat structural	11	pelantikan	102.025.000
Jumlah Rekomendasi dan SK dari BKPP Paser, BKD Provinsi dan BKN	35	org	171.226.000		
					15.333.035.300

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi dan visi kabupaten yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019.

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indicator kinerja

sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dicapai tahun 2019. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indicator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum mencapai target pencapaian yang diharapkan di tahun 2019. Maka dengan itu diharapkan pada tahun mendatang pencapaian yang belum mencapai target dapat di maksimalkan.

**Tabel 3**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser**

<b>TUJUAN 1</b>					
<b>TERWUJUDNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT DAN AKURAT</b>					
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) Aparatur Sipil Negara	A	B	100
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	100%	90%	90%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Kepegawaian	Persentase Record Data Pegawai yang diupdate	100%	100%	100%
		Persentase Tata Naskah Pegawai	100%	100%	100%



		yang Dikelola Sesuai NIP			
<b>TUJUAN 2</b>					
<b>TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PERANGKAT DAERAH KAB. PASER YANG BERKOMPETEN DAN BERKINERJA TINGGI</b>					
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1	Meningkatnya Kualitas dan kompetensi ASN	1. Persentase Pengadaan Pegawai pada formasi perangkat Daerah Sesuai Formasi	100%	0 %	0 %
		2. Persentase Penetapan Pejabat Struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	100%	100%	100%
		3. Persentase Penetapan Pejabat Struktural yang telah mengikuti Assessment Test	100%	106%	106%

Selanjutnya akan kami jabarkan masing – masing indicator kinerja pada tiap-tiap sasaran strategis pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

### **TUJUAN 1**

### **TERWUJUDNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT DAN AKURAT**

## Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

**Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara diperoleh dari survey angket yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan ASN Kab. Paser. Survei dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

Hasil survey sebagai berikut :

**Tabel 4**

### Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2017	65	A	100%	100%
2018	65	A	100%	100%
2019	65	A	100%	100%

Realisasi Tahun 2018 adalah grade A dengan capaian 100%

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

**Indikator** : Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara

Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dihitung dari Persentase terlaksananya pemenuhan target kinerja kegiatan-kegiatan rutin pendukung terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor

**Tabel 5**

**Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpelihara**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2017	100%	93%	93%
2018	100%	95%	95%
2019	100%	90%	90%

Realisasi Tahun 2019 adalah 90% dengan capaian 90%

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

**Indikator 1 :** Persentase Record Data Pegawai yang data yang diupdate

Persentase Record data pegawai yang diupdate dihitung dari Jumlah database pegawai yang diupdate dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Kabupaten Paser.

**Tabel 6****Persentase Record data Pegawai yang di Update**

Tahun	Jumlah data yang di Update	Jumlah PNS Tahun Berjalan	Realisasi	Capaian
2017	4934	4934	100%	100%
2018	4835	4835	100%	100%
2019	4871	4871	100%	100%

Realisasi Tahun 2019 adalah 100% dengan capaian 100%

**Indikator 2 : Persentase Tata Naskah Pegawai yang dikelola sesuai NIP**

Persentase Tata Naskah Pegawai yang dikelola sesuai NIP dihitung dari membandingkan Jumlah tata naskah yang dikelolas sesuai NIP dengan jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Kabupaten Paser.

**Tabel 7****Persentase Tata Naskah Pegawai yang Dikelola**

Tahun	Jumlah Tata naskah yang dikelola sesuai NIP	Jumlah PNS Tahun Berjalan	Realisasi	Capaian
2017	4934	4934	100%	100%
2018	4835	4835	100%	100%
2019	4871	4871	100%	100%

Realisasi Tahun 2019 adalah 100% dengan capaian 100%

## TUJUAN 2

### TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER YANG BERKOMPETEN DAN BERKINERJA TINGGI

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN

**Indikator 1:** Persentase Pengadaan Pegawai pada Perangkat Daerah Sesuai Formasi

Persentase Pengadaan Pegawai pada Perangkat Daerah Sesuai Formasi adalah dengan membandingkan jumlah CPNS yang lulus tes Penerimaan CPNS dengan Jumlah Formasi yang dibutuhkan. Berikut data hasil Penerimaan CPNS :

**Tabel 8**

#### Persentase Pengadaan Pegawai pada Perangkat Daerah Sesuai Formasi

Tahun	Jumlah orang yang lulus tes CPNS	Jumlah Formasi yang dibutuhkan	Target	Realisasi	Capaian
2017	44	44	100%	100%	100%
2018	177	166	100%	94%	94%
2019	141	0	100%	0%	0%

Realisasi Tahun 2019 adalah 0 dengan capaian 0%

Pencapaian yang Nihil pada tahun 2019 ini dikarenakan Pelaksanaan Tes CPNS yang mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yakni di akhir Tahun 2019 baru melaksanakan Tes awal yakni Tes SKD yang akan dilanjutkan untuk tes tahap dua di tahun berikutnya yakni tahun 2020.

**Indikator 2:** Persentase Penetapan Pejabat Struktural sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensinya

Untuk mengetahui Persentase Penetapan Pejabat Struktural sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensinya adalah dengan membandingkan Jumlah Pejabat Struktural yang dilantik sesuai kebutuhan dan kompetensinya dengan Jumlah Jabatan Struktural lowong pada tahun berkenaan

Berikut data hasil Penerimaan Penyelenggaraan Lelang Jabatan :

**Tabel**

**Persentase Penetapan Pejabat Struktural Sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensinya**

Tahun	Jumlah Pejabat yang dilantik	Jumlah Jabatan yang lowong	Target	Realisasi	Capaian
2017	47	50	100%	94%	94%
2018	9	4	100%	225%	225%
2019	4	4	100%	100%	100%

Realisasi Tahun 2019 adalah 0 dengan capaian 100%

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Paser baru saja melakukan perubahan Instansi-Intansi Pemerintah sehingga banyak membutuhkan Pejabat-Pejabat Baru, Sedangkan di tahun lalu yakni tahun 2018 adanya Pejabat yang mengundurkan diri dari Jabatannya sebelum menginjak masa pension dan ada pula Pejabat yang menjabat meninggal dunia sehingga jabatan yang harus diisi jadi bertambah. Sedangkan di tahun 2019 pengisian jabatan structural dapat terlaksana sesuai target.

**Indikator 3:** Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Assessment Test

Untuk mengetahui Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Assessment Test adalah dengan membandingkan Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat dan mengikuti Assessment Tes dengan Jumlah Jabatan Struktural lowong pada tahun berkenaan

Berikut data hasil Penerimaan Penyelenggaraan Lelang Jabatan :

**Tabel 10**

**Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Assessment Tes**

Tahun	Jumlah Pejabat yang mengikuti Assessment test	Jumlah Jabatan structural yang ada	Target	Realisasi	Capaian
2017	Belum Dilaksanakan				
2018	47	30	100%	156%	156%
2019	32	30	100%	106%	106%

Realisasi Tahun 2019 adalah 106% dengan capaian 106%

Dari tiga tahun berjalan dapat dilihat bahwa pada tahun-tahun dilaksanakannya Assessment Test banyak peminat yang mengikuti Assessment Test, sayangnya pelaksanaan di luar kota menjadikan kebutuhan anggaran yang besar sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti assessment test

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD

Secara keseluruhan jumlah anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 melalui alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp **20.332.468.300,00** (*Dua Puluh Milyar Tuga Ratus Tiga Puluh dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

#### a) BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai	: Rp.	4.999.433.000,00
-----------------	-------	------------------

#### b) BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai	: Rp.	1.503.652.800,00
-----------------	-------	------------------

Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	13.485.778.000,00
-------------------------	-------	-------------------

Belanja Modal	: Rp.	<u>343.604.500,00</u>
---------------	-------	-----------------------

<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>20.332.468.300,00</b>
--------------------------	--------------	--------------------------

Realisasi pencapaian kinerja keuangan atau realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 sebagai berikut:



**Tabel 11**  
**Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kabupaten Paser Tahun 2019**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET			REALISASI				
		FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		
		VOLUME		Rp	VOLUME	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>BELANJA TIDAK LANSUNG</b>	1	Tahun	4.999.433.000,00	1	tahun	100	4.114.797.234	82,31
	<b>BELANJA LANSUNG</b>								
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Kali	500.000,00	0	kali	0	-	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	53.270.000,00	12	bulan	100	53.270.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2	Unit	4.000.000,00	2	unit	100	2.055.300	51,38
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108	OB	110.100.000,00	72	OB	66,67	109.420.800	99,38
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	50.000.000,00	12	bulan	100	49.990.400	99,98
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	17.210.000,00	12	bulan	100	17.168.000	99,76
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	14.000.000,00	12	bulan	100	13.863.000	99,02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19	Unit	226.008.000,00	19	unit	100	209.220.000	92,57
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	4.104.000,00	12	bulan	100	3.256.000	79,34
	Penyediaan Makanan dan Minuman	350	Kotak	7.000.000,00	340	kotak	97,14	5.500.000	78,57
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	215.230.000,00	12	bulan	100	213.326.816	99,12
	Penataan Arsip SKPD	12	Bulan	120.938.000,00	12	bulan	100	115.821.050	95,77
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								
	Pengadaan Mebeleur	10	Unit	49.200.000,00	10	unit	100	39.380.000	80,04
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	9.780.000,00	12	bulan	100	9.780.000	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1	Unit	12.000.000,00	1	unit	100	11.986.000	99,88
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Unit	10.000.000,00	1	unit	100	9.920.000	99,2
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	14.300.000,00	12	bulan	100	14.300.000	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	17.600.000,00	12	bulan	100	17.550.000	99,72
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>								

	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural	11	Pelantikan	102.025.000,00	4	pelantikan	100	57.675.000	56,53
	Pengambilan Sumpah Janji PNS	130	Org	121.315.000,00	130	org	100	112.041.308	92,36
<b>4</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>								
	Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas	160	Org	121.870.000,00	47	org	29,38	98.300.950	80,66
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	70	Org	3.834.141.800,00	70	org	100	3.657.699.897	95,40
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>								
	Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten	10	Buku	3.150.000,00	10	buku	100	3.150.000	100
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>								
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	4	Triwulan	15.263.800,00	4	triwulan	100	15.190.800	99,52
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>								
	Penyusunan RENJA SKPD	10	Dokumen	37.650.000,00	10	dokumen	100	37.627.000	99,94
	Evaluasi RENJA SKPD	4	Triwulan	4.950.000,00	4	triwulan	100	4.950.000	100
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>								
	Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan oleh Tim BAPERJAKAT	70	Org	417.650.000,00	70	org	100	382.901.955	91,68
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	45	Org	1.124.975.000,00	70	org	155,56	993.239.577	88,29
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	166	Org	3.600.387.000,00	166	org	100	3.564.823.992	99,01
<b>9</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>								
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	14	Org	784.234.600,00	14	org	100	781.910.300	99,70
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	500	Org	299.703.400,00	0	org	0	198.635.581	66,28
	Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat	1000	Org	389.676.000,00	1014	org	101,4	382.216.075	98,09
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	2	Dokumen	153.675.000,00	2	dokumen	100	149.941.380	97,57
	Penyelesaian SK Pensiun/Nota Usul Persetujuan BKN	130	SK	266.024.000,00	122	SK	93,85	265.379.546	99,76
	Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	166	Cpns	196.350.000,00	166	cpns	100	193.975.852	98,79
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	231	Dokumen	91.560.000,00	231	dokumen	100	91.410.547	99,84
	Pengelolaan Tatanaskah/Roll O Pack PNS	870	tata naskah	21.880.400,00	870	tata naskah	100	20.737.960	94,78
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	1	Dokumen	56.900.000,00	1	dokumen	100	55.582.192	97,68
	Penyelesaian Penerbitan SK Jabatan Fungsional	150	Org	186.650.000,00	123	org	82	162.910.088	87,28

Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	800	Kartu	38.362.500,00	800	kartu	100	36.635.500	95,50
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	12	Dokumen	158.194.000,00	14	dokumen	116,67	155.307.571	98,18
Penataan Administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat	1000	Org	67.825.000,00	1000	org	100	59.584.100	87,85
Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS	1	Aplikasi	58.132.400,00	1	aplikasi	100	57.778.428	99,39
Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	12	Org	62.600.000,00	13	org	108,33	53.103.000	84,83
Lelang Jabatan ASN	4	Jabatan	848.435.000,00	4	jabatan	100	800.347.265	94,33
Assessment PNS	20	Org	492.770.200,00	32	org	160	463.887.016	94,14
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Memenuhi Masa Kerja yang telah ditentukan	500	Org	132.200.000,00	444	org	88,8	127.164.419	96,19
Fasilitasi Pengelolaan Assessment Center	12	Bulan	250.450.000,00	12	bulan	100	242.280.000	96,74
Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	42	Kartu	88.015.000,00	63	kartu	150	86.918.370	98,75
Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN	35	Org	171.226.000,00	27	org	77,14	148.447.200	86,70
Penilaian Kinerja PNS	4831	Org	131.179.600,00	4831	org	100	126.168.997	96,18
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	4831	Dokumen	57.519.600,00	4831	dokumen	100	56.609.161	98,42
Rekonsiliasi Data Kepegawaian	100	Persen	10.855.000,00	100	persen	100	10.834.000	99,81
<b>Pagu Anggaran Tahun 2019</b>			<b>20.332.468.300</b>	<b>Realisasi</b>			<b>18.665.969.627</b>	<b>91,80</b>

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat efesiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi keuangan atau realisasi anggaran Tahun 2019. Dengan Rincian hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang menargetkan Kinerja sebanyak 10 kali pengiriman surat dengan anggaran Rp. 500.000,- tidak terlaksana 100% baik kinerja maupun anggaran karena tidak adanya pengiriman surat lintas daerah.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.53.270.000,- selama 12 bulan terlaksana 100% dengan besaran anggaran yang sama

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional yang ditargetkan sebanyak 2 unit dengan anggaran Rp. 4.000.000,- dapat terbayarkan 100% .pemenuhan kebutuhan Pajak STNK hanya sebesar Rp. 2.055.300,- yakni 51,38% dari besarnya anggaran yang tersedia. Dikarenakan jumlah tagihan dari pajak kendaraan berdasarkan kebijakan pemerintah mengalami penurunan.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan yang semula ditargetkan untuk pembayaran honor keuangan orang/bulan sebanyak 108 dengan anggaran Rp. 110.100.000,00 dapat terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99,38%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor yang ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan 12 bulan terlaksana menyeluruh dengan capaian 100% dengan besar anggaran yang keluar sebesar Rp. 49.990.400,- atau 99,98%
6. Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan dengan besar anggaran sebesar Rp. 17.210.000,- . terlaksana 100% dengan serapan anggaran Rp. 17.168.000,- atau 99,76%
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor untuk kebutuhan 12 bulan dengan anggaran Rp. 14.000.000,- dapat terlaksana sesuai target 100% dengan besaran anggaran yang keluar yakni Rp. 13.863.000 atau 99,02%
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 19 unit dengan besar anggaran Rp. 226.008.000,- dapat tersedia 100% dengan besaran anggaran yang keluar yakni sebesar Rp. 209.220.000,- atau 92,57%
9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 4.104.000,- dapat terlaksana selama

12 bulan (100%) dengan besar anggaran yang keluar sebesar Rp. 3. 256.000 atau sebesar 79,34%

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat yang dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman rapat sebanyak 350 kotak dapat terlaksana 97,14% yakni 340 kotak dengan anggaran yang keluar sebesar Rp. 5.500.000,- atau 78,57% dikarenakan kuota yang mengikuti rapat tidak sebanyak yang diprediksikan

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 215.230.000 untuk memenuhi kebutuhan selama 12 bulan terlaksana secara menyeluruh (100%) dengan total anggaran yang keluar sebesar Rp. 213.326.816,- atau 99,12%

12. Kegiatan Penataan Arsip SKPD untuk kebutuhan 12 bulan dengan anggaran Rp. 120.938.000 dapat terlaksana 100% dengan anggaran yang keluar sebesar Rp. 115.821.050 atau 95,77%

13. Kegiatan Pengadaan Meubeleur sebanyak 10 unit dengan anggaran sebesar Rp. 49.200.000 dapat telaksana 100% dengan anggaran yang keluar sebesar rp. 39.380.000 atau 80,04%

14. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 9.780.000 dapat terlaksana 100% dengan anggaran yang keluar sebesar Rp. 9.780.000 atau 100%

15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 12.000.000,- telah terlaksana sepanjang 12 tahun (100%) dengan besaran anggaran yang keluar Rp.11.986.000,- (99,88%)

16. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sebanyak 1 unit dengan anggaran Rp. 10.000.000,- telah terlaksana 100% dengan besar anggaran yang keluar yaitu Rp. 9.920.000,00 atau 99,2%
17. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung kantor selama 12 bulan dengan besar anggaran Rp. 14.300.000,- dapat terlaksana 100% dengan besar anggaran yang keluar Rp. 14.300.000,-
18. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Peralatan Gedung kantor selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 17.600.000,- dapat terlaksana 100% dengan besar anggaran yang keluar Rp. 17.550.000,-
19. Kegiatan Pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Struktural sebanyak 11 pelantikan dengan anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 102.025.000 terlaksana 100% dengan besaran anggaran yang terserap hanya Rp. 57.675.000,- atau 56,53%
20. Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS sebanyak 130 orang dengan anggaran sebesar Rp. 121.315.000 dapat terlaksana 100% dengan besaran anggaran yang keluar Rp. 112.041.038,- atau 92,36%
21. Kegiatan pembekalan bagi PNS yang akan memasuki purna tugas ditargetkan akan memanggil peserta 160 orang dengan anggaran Rp. 121.870.000,-. Hasilnya hanya dihadiri oleh 47 orang dengan besaran anggaran yang terserap Rp. 98.300.950,- atau 80,66% dikarenakan rendahnya minat pegawai yang akan memasuki purna tugas untuk mengikuti acara-acara semisal pembekalan.
22. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS yang ditargetkan akan diikuti oleh 70 orang dengan besaran anggaran Rp. 3.834.141.800,- terlaksana 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 3.657.699.897,- atau 95,40%

23. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang direncanakan tersusun sebanyak 10 dokumen dengan anggaran Rp. 3.150.000,- terlaksana 100% baik dokumen dan anggarannya
24. Penyusunan data statistic sectoral sebanyak 10 dokumen dengan anggaran Rp. 15.263.800 terlaksana 100% dengan besarang anggaran yang keluar Rp.15.190.800,- atau 99,52%
25. Penyusunan RENJA SKPD sebanyak 10 dokumen dengan anggaran sebesar Rp.37.650.000,- dapat terlaksana 100% dengan serapan anggaran Rp.37.627.000 atau 99,94%
26. Evaluasi RENJA SKPD selama 4 triwulan dengan anggaran sebesar Rp.4.950.000 terlaksana 100% baik kinerja dan anggarannya
27. Kegiatan Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan oleh Tim BAPERJAKAT yang ditargetkan untuk 70 orang dengan anggaran Rp. 417.650.000,- terlaksana 100% dengan besar anggaran yang terserap Rp. 382.902.955 atau 91,68%
28. Pendidikan dan Pelatiha Teknis Tugas dan Fungsi PNS daerah yang ditargetkan 45 orang menjadi 70 orang realisasinya dengan anggaran yang terserap ditambahn dengan anggaran tambahan menjadi Rp.993.239.577,- atau 91,68% dikarenakan banyaknya jabatan fungsional yang mengikuti sertifikasi jabatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
29. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dengan target cpns sebanyak 166 orang terlaksana 100%. Dengan besarnya anggaran Rp.3.600.387.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.564.823.992,- atau 99,01%

30. Pemberian bantuan ikatan dinas sebanyak 14 orang dengan anggaran Rp.784.234.600 dapat terlaksana 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp.781.910.300,- atau 99,70%
31. Seleksi Penerimaan CPNS sebanyak 500 orang dengan besaran anggaran Rp.299.703.400,- terlaksana di akhir tahun karena mengikuti jadwal dari kementrian, sehingga hingga akhir tahun proses tes masih berjalan dan masih berlanjut hingga tahun 2020. Sehingga calon PNS yang terjaring blm ada atau 0% pada tahun 2019 dan anggaran yang terserap sebanyak Rp. 198.635.581,- atau hanya 66,28%
32. Pada kegiatan Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat yang ditargetkan sebanyak 1000 dengan anggaran Rp.389.676.000,- terealisasi melebihi target yakni sebanyak 1014 orang karena ada beberapa pegawai yang naik pangkat pilihan. Dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 382.216.075,-
33. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.153.675.000 target 2 dokumen terlaksana 100% dengan serapan anggaran sebanyak Rp. 149.941.380 atau 97,57%
34. Kegiatan penyelesaian SK pensiun/ Nota usul Persetujuan BKN dengan anggaran Rp. 266.024.000,- menargetkan 130 SK pensiun dalam 1 tahun direalisasikan sebanyak 122 orang dengan serapan anggaran sebesar Rp. 265.379.546,- atau 99,76%
35. Kegiatan Penyelesaian administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang menargetkan 166 orang dengan anggaran sebesar Rp.196.350.000,- terlaksana menyeluruh dengan serapan anggaran sebesar Rp.193.975.852 atau 98,79%



36. Kegiatan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 231 dokumen dengan anggaran Rp. 91.560.000,- terlaksana 100% dengan anggaran yang terserap Rp.91.410.547 atau 99,84%
37. Pengelolaan Tata naskah/ roll o pack PNS dengan target 870 tata naskah dengan anggaran sebesar Rp. 21.880.400 terlaksana 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 20.737.960,- atau 94,78%
38. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan system aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) sebanyak 1 dokumen terlaksana 100% dengan anggaran sebesar Rp. 56.900.000 terlaksana sebesar Rp. 55.582.192,- atau 97,68%
39. Penyelesaian penerbitan SK jabatan fungsional dengan anggaran Rp. 186.650.000,- dengan target 150 orang terlaksana 123 orang dengan anggaran yang terserap Rp.162.910.088 atau 87,28%
40. Pembuatan kartu identitas PNS dilingkungan pemerintah kabupaten paser ditargetkan 800 kartu dengan anggaran Rp. 38.362.500 terlaksana 100% dengan anggaran sebesar Rp. 36.635.500,- atau 95,50%
41. Kegiatan proses penganganan kasus-kasus pelanggaran disiplin sebanyak 12 dokumen dengan anggaran Rp.158.194.000,- terlaksana sebanyak 14 kasus dengan besaran anggaran yang diserap sebesar Rp. 155.307.571 atau 98,18%
42. Kegiatan penataan administrasi dan evaluasi kenaikan pangkat sebanyak 1000 orang dengan anggaran Rp.67.825.000,- terealisasi sebanyak 1000 orang atau 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 59.584.100 atau 87,85%
43. Pengembangan system administrasi kenaikan gaji berkala otomatis PNS dengan target kinerja 1 aplikasi terlaksana 100% dengan keluaran anggaran sebesar Rp. 57.778.428 atau 99,39%

44. Peninjauan dan atau perbaikan masa kerja PNS sebanyak 12 orang terlaksana sebanyak 13 orang dengan serapan anggaran sebesar Rp. 53.103.000 atau 84,83%
45. Pekerjaan lelang jabatan PNS dengan anggaran 848.435.000 terlaksana sebanyak 4 jabatan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 800.347.265,- atau 94,33%
46. Assesmen PNS ditargetkan untuk 20 orang dengan besar anggaran Rp. 492.770.200,- terlaksana dengan peserta 32 orang dengan serapan anggaran sebesar Rp. 463.887.016 atau 94,14%
47. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memenuhi masa kerja yang telah ditentukan sebanyak 500 orang dengan besaran anggaran Rp. 132.200.000 terlaksana sebanyak 444 orang dengan serapan anggaran sebesar Rp. 127.164.419,- atau 96,19%
48. Fasilitasi pengelolaan Assessment Center selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 250.450.000,- terlaksana 100% dengan serapan anggaran Rp. 242.280.000,- atau 96,74%
49. Penyelesaian administrasi identitas kepegawaian sebanyak 42 kartu sebanyak Rp. 88.015.000,- terlaksana 63 kartu dengan realisasi anggaran Rp. 86.918.370,- atau 98,75%
50. Pelaksanaan administrasi pindah tugas ASN dan status ASN dengan anggaran sebesar Rp. 171.226.000 sebanyak 35 orang terealisasi sebanyak 27 orang dengan serapan anggaran Rp. 148.447.200,- atau 86,70%
51. Penilaian Kinerja PNS ditargetkan untuk semua PNs sebanyak 4831 orang dengan anggaran sebesar Rp. 131.179.600 terlaksana 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 126.168.997,- atau 96,18%

52. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN sebanyak 4831 dokumen terlaksana 100% dengan serapan anggaran dari Rp. 57.519.600 terserap Rp. 56.609.161,- atau 98,42%

53. Rekonsiliasi data kepegawaian sebanyak 100% dengan besaran anggaran Rp.10.855.000 terlaksana 100% dengan serapan anggaran Rp. 10.834.000 atau 99,81%.

Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah sebesar **Rp. 20.332.468.300,00** telah terserap sebesar **Rp.18.665.969.627,00** atau **91,80** persen. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.666.498.673,00**.

Secara garis besar Penyerapan anggaran pada Tahun 2019 berjalan baik berbanding lurus dengan hasil realisasi kinerja yang telah terlaksana. Penyerapan Anggaran per tahun dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 12

## Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Tahun

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	10.123.635.873,00	8.925.901.486,00	88,17
2	2018	11.696.379.833,00	11.254.793.851,00	96,22
3	2019	20.332.468.300,00	18.665.969.627,00	91,60

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah anggaran, realisasi anggaran, sisa anggaran dan fisik kegiatan yang telah dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi tentang hasil pengukuran kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan penetapan kinerja tahun 2019. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 diperoleh nilai capaian kinerja rata-rata sebesar 98 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis tergolong dalam kriteria "Sangat Berhasil".
2. Pada tahap pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran strategis ditemukan beberapa kendala, antara lain Kegiatan Pengambilan Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural dengan anggaran Rp.102.025.000 dan realisasi anggaran Rp.57.675.000 atau hanya 56,53% atas anggaran, sementara realisasi fisik hanya mencapai 36,36% dengan capaian 4 kali dari target 11 kali pelantikan. Hal tersebut dikarenakan pelantikan dilakukan tergantung kebijakan dari pejabat terkait diluar kekuasaan dan kendali dari badan, di tahun 2019, jadi anggaran tidak bisa terserap 100%.
3. Pada Kegiatan seleksi Penerimaan Calon PNS dengan anggaran Rp. 299.703.400 hanya terealisasi 66,28% yakni sebesar Rp. 198.635.581 dan target kinerja tidak tercapai sebanyak 500 orang dikarenakan kebijakan

Permenpan sehingga proses penerimaan dilaksanakan pada desember 2019 dan dilanjutkan seleksi TKD dan TKB diadakan di tahun 2020

4. Kegiatan Jasa Surat Menyurat yang baik anggaran dan realisasi tidak terlaksana 100% dikarenakan tidak adanya pelaksanaan pengiriman surat ke luar daerah. Semua surat keluar hanya ditujukan untuk daerah dalam kota sendiri.
5. Banyaknya target yang tidak sinkron lagi dengan Rencana strategis jangka 5 tahun dikarenakan banyak regulasi yang berubah, contohnya seperti laporan harta kekayaan yang sebelumnya dilaporkan manual sekarang diharuskan secara online sehingga target yang diterakan di Renstra tidak sejalan lagi dengan target di lapangan, adanya kebijakan Permenpan tentang Penerimaan CPNS dan P3k yang tidak sesuai dengan renstra tahun berjalan.